

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB



TRIWULAN IV 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021

Tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

Disahkan di Demak

Pada hari : Rabu, 31 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud Dan Tujuan.....	5
C. Landasan Hukum	5
D. Unsur SPAK	5
BAB II METODE SURVEI	7
A. Periode Survei.....	7
B. Metode Penelitian	7
BAB III PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI.....	8
A. Pelaksanaan	8
B. Teknik Survei Persepsi Anti Korupsi	8
C. Penyusunan Laporan.....	9
BAB IV PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
A. Persiapan Survei	10
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Persepsi Anti Korupsi.....	14
C. Pengolahan Data	15
BAB V HASIL PENGUKURAN	18
A. Hasil Penyusunan Indeks	18
B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi	20
BAB VI PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Rekomendasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya mengenai pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, oleh karena itu perlu mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi. Bahwa Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

C. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

D. Unsur SPAK meliputi:

- a. Manipulasi Peraturan

Unsur manipulasi peraturan terkait pemberian pelayanan apakah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

- b. Penyalahgunaan Jabatan

Unsur penyalahgunaan jabatan terkait penyalahgunaan jabatan oleh petugas pelayanan dengan meminta imbalan tertentu.

- c. Menjual Pengaruh

Unsur menjual pengaruh terkait upaya yang dilakukan oleh aparatur pengadilan dengan menawarkan bantuan untuk membantu mengurus perkara.

d. Transaksi Biaya

Unsur transaksi biaya terkait informasi dan keterbukaan mengenai tarif/biaya layanan di pengadilan.

e. Biaya Tambahan

Unsur transaksi biaya terkait apakah biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat di luar tarif resmi.

f. Hadiah

Unsur hadiah terkait pemberian hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada aparatur pengadilan.

g. Transparansi Biaya

Unsur transparansi biaya terkait dengan pemberian bukti transaksi pembayaran di pengadilan.

h. Percaloan

Unsur percaloan terkait adanya praktek percaloan di pengadilan

i. Perbuatan curang

Unsur perbuatan curang terkait adanya informasi mengenai praktek KKN di pengadilan.

j. Transaksi Rahasia

Unsur transaksi rahasia terkait dengan pengurusan perkara melalui aparatur pengadilan.

BAB II

METODE SURVEI

A. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap persepsi anti korupsi. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk pengambilan kebijakan untuk mencegah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam bidang peradilan melakukan survei secara berkala dalam jangka waktu/periode 3 (tiga) bulan sekali.

B. Metode penelitian

Untuk melakukan survei secara periodik Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan

1. Pelaksana survei
 - a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang terdapat pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
 - b. Pelaksanaan survei dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.
2. Tahapan survei

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

 - 1) Menyusun instrumen survei;
 - 2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
 - 3) Menentukan responden;
 - 4) Melaksanakan survei;
 - 5) Mengolah hasil survei;
 - 6) Menyajikan dan melaporkan hasil.

Tahapan penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Teknik Survei Persepsi Anti Korupsi

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;
3. Kuesioner elektronik (*e-survei*);
4. Diskusi kelompok terfokus;
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

Bawa dalam pelaksanaan survei ini, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menggunakan teknik survei kuesioner melalui aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

C. Penyusunan Laporan

Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

1. Materi Pokok Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi

Materi pokok dalam Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi mencakup: latar belakang, maksud dan tujuan, metode, tim survei dan jadwal pelaksanaan serta tindak lanjut Survei Persepsi Anti Korupsi, sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan: latar belakang, tujuan, metode, tim dan jadwal pelaksanaannya:

- a. Latar belakang memuat berbagai hal penyebab munculnya problematika dalam penyusunan survei, baik ditinjau dari komponen yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

- b. Tujuan berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi).

- c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.

- d. Tim Survei terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretariat.

- e. Jadwal memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.

2) Analisis

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

3) Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi tentang intisari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi, baik bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkret pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana
 - a. Pelaksanaan survei dilaksanakan secara swakelola, dengan membentuk Tim penyusunan survei persepsi anti korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Nomor : 110/KPN.W12-U23/OT1.6/IX/2025 tentang Penunjukan Tim Penyusun Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan Survei Harian (SH) pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB; Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Niken Rochayati, S.H., M.H. NIP. 198005082002122002	Wakil Ketua	Koordinator
2	Ismail, S.H., M.H. NIP. 196707011987032001	Panitera	Ketua
3	Ngabdul Ngayis, S.H. NIP. 197012061993031003	Panitera Muda Hukum	Anggota
4	Nofretari, S.H.I NIP. 199307142025052001	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Anggota
5	Lisnawati, A.Md. NIP : 200003042025062017	Klerek – Dokumentalis Hukum	Anggota
6	Rengga Hardi Sasongko, S. Kom. NIP:199203082025211030	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota
7	Samsul Komarudin, S.Kom. NIP:198307032025211058	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota
8	Yahya Arif NIP:198006292025211032	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota

2. Penyiapan Bahan Survei

- a. Kuesioner

Dalam menyusun Survei Persepsi Anti Korupsi digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data persepsi anti korupsi. Kuesioner sudah disusun dalam aplikasi si-

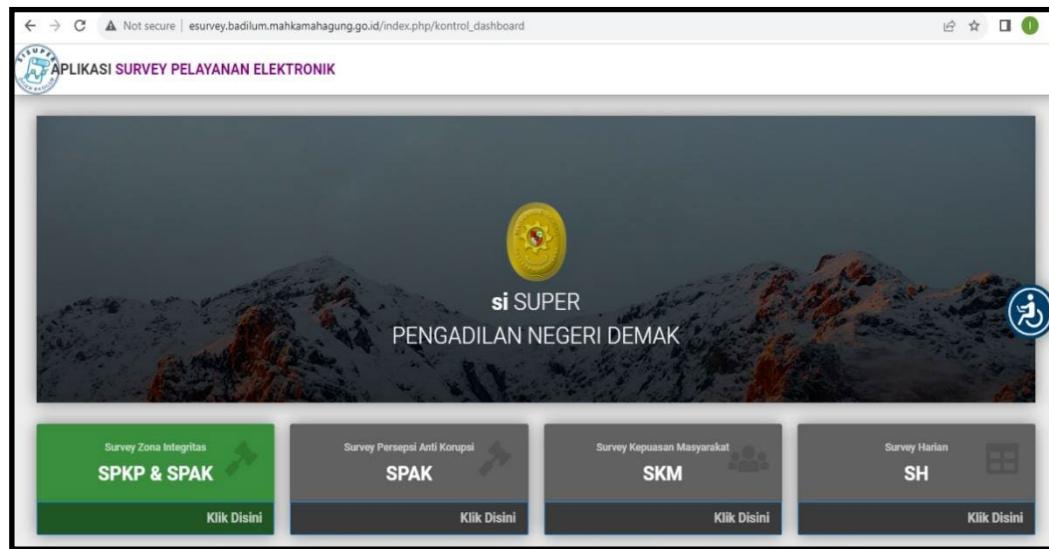
SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

b. Bagian Kuesioner

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :

1) Bagian Pertama

Pada bagian pertama berisikan dashboard responden, nama aplikasi dan nama instansi yang dilakukan survei.



Gambar 1. Halaman Depan Aplikasi si-SUPER

2) Bagian Kedua

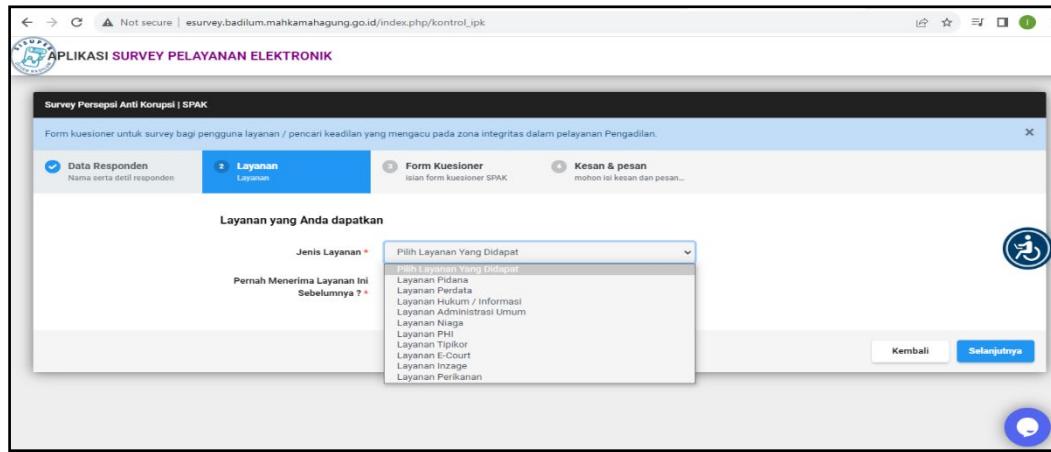
Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei.

The screenshot shows the "Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK" section of the application. At the top, there are tabs for "Data Responden" (selected), "Layanan", "Form Kuesioner", and "Kesan & pesan". Below the tabs, there is a heading "Data Responden SPAK" with several input fields: "Nama" (placeholder: boleh initial atau tidak diisi.), "Umur / Jenis Kelamin" (with dropdown for "Pilih Jenis Kelamin" and note: Minimal 18 Tahun), "Nomor HP" (+62 placeholder, note: Contoh : 81211112222), "Domicili" (dropdown for "Pilih Wilayah"), "Pendidikan" (dropdown for "Pilih Pendidikan"), and "Pekerjaan" (dropdown for "Pilih Pekerjaan"). The bottom right corner of the screen has icons for accessibility and a speech bubble.

Gambar 2. Bagian Kuesioner (Data Responden)

3) Bagian Ketiga

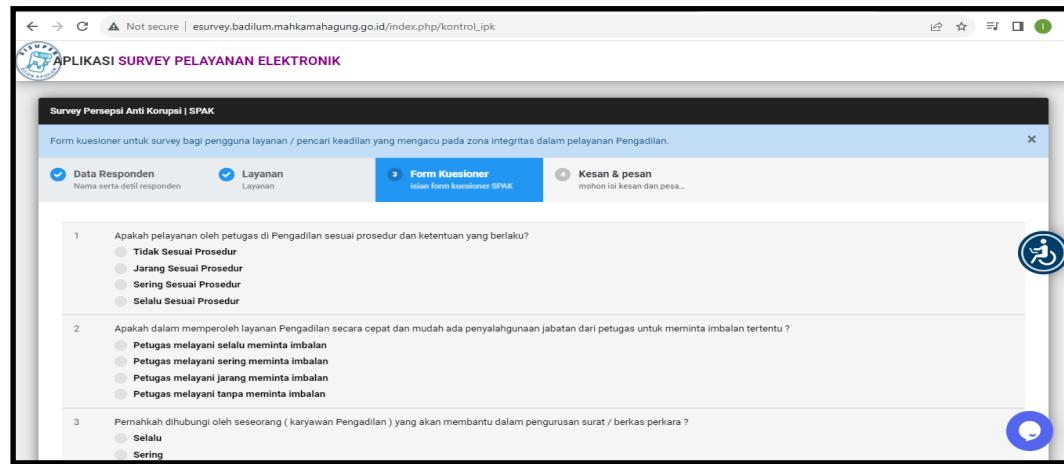
Pada bagian ini berisikan jenis layanan yang telah diterima oleh responden. Adapun jenis layanan yang ada di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah layanan Pidana, layanan Perdata, layanan Hukum/Informasi, layanan Administrasi Umum, layanan e-Court dan layanan Inzage.



Gambar 3. Bagian Kuesioner (Data Layanan)

4) Bagian Keempat

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup).



Gambar 4. Bagian Kuesioner (Daftar Pertanyaan)

5) Bagian Kelima

Pada bagian ini berisikan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

The screenshot shows a web-based survey application titled 'APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK'. The main menu includes 'Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK', 'Data Responden', 'Layanan', 'Form Kuesioner', and 'Kesan & pesan'. The 'Kesan & pesan' section contains a large text input field with placeholder text: 'Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini...'. Below this is a note: 'Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Demak. Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.' There is a checkbox labeled 'Saya bukan robot' followed by a CAPTCHA image and a green 'Simpan Data' button.

Gambar 5. Bagian Kuesioner (Kesan & Pesan)

c. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur persepsi anti korupsi dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat persepsi anti korupsi. Tingkat persepsi anti korupsi dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur Manipulasi Peraturan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila prosedur dan ketentuan tidak sesuai, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila prosedur dan ketentuan jarang sesuai, pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur dan ketentuan sesuai, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur dan ketentuan dirasa selalu sesuai, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan dari Pengadilan Negeri Demak Kelas IB. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), besaran populasi dan sampel menggunakan tabel sampel dari ***Morgan and Krejcie (Lampiran II)*** dimana ditentukan populasi sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) dengan responden terpilih sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) responden.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di ruang PTSP Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mulai bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a) Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur persepsi anti korupsi yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menetapkan 10 (sepuluh) unsur persepsi anti korupsi yang akan ditanyakan kepada seluruh responden, yaitu unsur Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Transaksi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiyah, Transparansi Biaya, Percaloan, Perbuatan Curang dan Transaksi Rahasia.

b) Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan langsung melalui aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

C. Pengolahan Data

Pengolahan data masing-masing metode Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan sebagai berikut:

1. Pengukuran Skala Likert

a) Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei persepsi anti korupsi terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

X = jumlah unsur yang disurvei

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 10 (sepuluh) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

Untuk memperoleh nilai Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SPAK Unit pelayanan} \times 25$$

Tabel I

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Capaian Konversi, Mutu dan Kinerja

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Capaian Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
	A	b = (a x 25)		
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi

3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

D. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengolahan dengan komputer

Data *entry* dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base.

2. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur persepsi anti korupsi dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

- 1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur persepsi anti korupsi dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur persepsi anti korupsi, maka jumlah nilai masing-masing unsur persepsi anti korupsi dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur persepsi anti korupsi, maka jumlah nilai rata-rata per unsur persepsi anti korupsi dikalikan dengan 0,1 (apabila 10 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

- 2) Nilai indeks persepsi anti korupsi

Untuk mendapatkan nilai survei dengan cara menjumlahkan X unsur

3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

4. Penyusunan Jadwal.

Penyusunan indeks persepsi anti korupsi diperkirakan memerlukan waktu selama 50 (lima puluh) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan (Pembentukan Tim Survei, penyusunan kuesioner), 2 (dua) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hasil 3 (tiga) hari kerja;

BAB V

HASIL PENGUKURAN

A. Hasil Penyusunan Indeks

Data akhir kegiatan penyusunan indeks persepsi anti korupsi dari setiap unit pelayanan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

1. Indeks setiap unsur persepsi anti korupsi

Berdasarkan hasil penghitungan indeks persepsi anti korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur persepsi anti korupsi. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,1 (untuk 10 unsur). Adapun nilai unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh setiap unsur persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II
Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No	Unsur SPAK	Nilai Unsur SPAK
1.	Manipulasi Peraturan	3.952
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3.747
3.	Menjual Pengaruh	3.777
4.	Transaksi Biaya	3.741
5.	Biaya Tambahan	3.693
6.	Hadiah	3.747
7.	Transparansi Biaya	3.783
8.	Percaloan	3.807
9.	Perbuatan Curang	3.819
10.	Transaksi Rahasia	3.795

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3.952 \times 0,1) + (3.747 \times 0,1) + (3.777 \times 0,1) + (3.741 \times 0,1) + (3.693 \times 0,1) + (3.747 \times 0,1) + (3.783 \times 0,1) + (3.807 \times 0,1) + (3.819 \times 0,1) + (3.795 \times 0,1) = \text{Nilai Indeks (X)} \text{ adalah } \mathbf{3,786}.$$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{a) Nilai SPAK setelah dikonversi} &= \text{Nilai Indeks} \times \text{Nilai Dasar} \\
 &= 3,786 \times 25 \\
 &= 94,65
 \end{aligned}$$

b) Kinerja = **Bersih dari korupsi**

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

Tabel I
Nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi

No	Unsur SPAK	NRR per Unsur	NRR tertimbang per Unsur
1.	Manipulasi Peraturan	3.952	0,395
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3.747	0,375
3.	Menjual Pengaruh	3.777	0,378
4.	Transaksi Biaya	3.741	0,374
5.	Biaya Tambahan	3.693	0,369
6.	Hadiah	3.747	0,375
7.	Transparansi Biaya	3.783	0,378
8.	Percaloan	3.807	0,381
9.	Perbuatan Curang	3.819	0,382
10.	Transaksi Rahasia	3.795	0,380
Nilai Indeks			3,786
Nilai Indeks setelah dikonversi (NI x 25)			94,65

Dari hasil penilaian masyarakat terhadap 10 (sepuluh) unsur persepsi anti korupsi diperoleh unsur yang terendah sebagai berikut:

1. Biaya Tambahan;
2. Transaksi Biaya;
3. Penyalahgunaan Jabatan

B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi

Terkait pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi periode Triwulan IV Tahun 2025 di lingkup Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya:

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada responden oleh petugas survei terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi;
2. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner, sehingga perlu dicoba pelaksanaan survei dengan teknik wawancara tatap muka;

Tabel I

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN SPAK

3 (tiga) UNSUR TERENDAH

No	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Biaya Tambahan	• Monev Standar Pelayanan	2 bulan (Januari-Februari 2025)	Panitera, Panmud
2	Transaksi Biaya	• Monev Standar Pelayanan	2 bulan (Januari-Februari 2025)	Panitera, Panmud
3	Penyalahgunaan Jabatan	• Monev Standar Pelayanan	2 bulan (Januari-Februari 2025)	Panitera, Panmud

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil survei, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan Pengadilan Negeri Demak dipersepsiakan **Bersih dari Korupsi** oleh para pengguna layanan. Hal ini terlihat dari hasil/pencapaian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh berada pada nilai interval konversi **81.26-100.00**. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh dari 10 (sepuluh) unsur persepsi anti korupsi adalah **94,65**.
2. Unsur **Biaya Tambahan** merupakan unsur yang nilai pencapaian terendah dibandingkan dengan unsur-unsur pelayanan yang lainnya, dimana pencapaiannya berada pada nilai interval **3.693**.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya tindak lanjut/upaya peningkatan integritas aparatur peradilan khususnya petugas pemberi layanan.
2. Perlu adanya publikasi tentang informasi tarif/biaya layanan melalui berbagai media maupun petugas layanan di pengadilan.

Data Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV

71	M.Kunadi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	Sulthon Ali	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	Silpha Kurnia	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	A.Rizal	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	Pangestu Ismuarga Wahyu	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	S.Eko.W	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	Riko	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	Abdul Rokhim	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	Nailatul Choffifah	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	Al Muslimin	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	Apul R Saragih	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	Subianto	Layanan Pidana	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
83	Gustonul Angsori	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	Isna Rokhim	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
85	Ahmad Qharis	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	ISKANDAR	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	ANDRI PRIBADI	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
88	ERIK PRASETYO	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	Sugiono	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	Dimas Prasetyo Yudi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	Lukman Hakim	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	Andhika Yoga	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	Khanif	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	Fami Ainun Najib	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	Mohtar Lutfi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	Bripka Kuadid	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	Nurul Azhar	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	SITI WAEHSATU	Layanan Administrasi Umum	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
99	RIAN HIDAYATULLAH	Layanan Hukum / Informasi	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
100	IMRON SURURI	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
101	KHARTIKA DWI CHANDRA	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3
102	ADITYA KURNIAWAN	Layanan Hukum / Informasi	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
103	R SEFRIN IBNU W	Layanan Hukum / Informasi	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
104	ANDRI PRIBADI	Layanan Hukum /	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4

Informasi												
105	HADID	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
106	ANDIKA YOGA SAPUTRA	Layanan Hukum / Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
107	DICUY WAHYU P	Layanan Pidana	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
108	IMAM MATURIDI	Layanan Perdata	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3
109	RAZUA ADITYA	Layanan Perdata	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4
110	LISTIYA INDAH	Layanan Hukum / Informasi	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
111	MOCH BATRODIN	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
112	IMROATUL KHASANAH	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
113	ANDRI PRIBADI	Layanan Hukum / Informasi	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
114	Siti	Layanan Hukum / Informasi	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4
115	SETYO BUDI UTOMO	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4
116	ROY KRISTIONO	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
117	ARIF PRASETYO	Layanan Hukum / Informasi	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4
118	SRI RISKI MUSTIKAYANI	Layanan Perdata	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
119	NURHADI	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
120	HAPPY OKTAVIANI	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4
121	SUBIYANTORO	Layanan Hukum / Informasi	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
122	M KHOERUR ROZIQIN	Layanan Hukum / Informasi	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
123	DEDY FAJAR	Layanan Perdata	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
124	ADITYA MARYANTO	Layanan Hukum / Informasi	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
125	DANANG EPL	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
126	DANANG EPL	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
127	SANGIDUN	Layanan Pidana	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
128	ENI WIDURI	Layanan Perdata	4	4	3	3	3	3	3	4	3	2
129	TRI ROCHAYATUN	Layanan Hukum / Informasi	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3
130	JULIANA	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
131	MUH QOHAR	Layanan Perdata	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4
132	OKI PRASETIYO	Layanan Perdata	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
133	HADI SISWO UTOMO	Layanan Perdata	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
134	NUR HIDAYAH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
135	LISA DWI R	Layanan Hukum / Informasi	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
136	SANGIDUN	Layanan Pidana	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3
137	ENI WIDURI	Layanan Hukum / Informasi	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
138	LAILATUL LUTFIYAH	Layanan Hukum /	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IV

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total

Data Umum Responden

Data Domisili Responden

Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Unsur

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI DEMAK

NILAI INDEKS

3,79 / 94,65 %

Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

JUMLAH	166 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 124 ORANG	
PEREMPUAN : 42 ORANG		
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 3 ORG	Diploma 3 : 4 ORG
	SMP : 0 ORG	S1 : 82 ORG
	SMU : 64 ORG	S2 : 10 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 3 ORG
PEKERJAAN	PNS : 14 ORG	SWASTA : 82 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRASAHA : 5 ORG
	POLRI : 13 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
LAINNYA : 52 ORG		